

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: EVALUASI PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PENDAPATAN DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Najwa Sakinah¹⁾, Liya Ermawati²⁾, Is Susanto³⁾

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

EMail Korespondansi¹⁾: najwasakinah15@gmail.com

Email²⁾: liyaermawati@radenintan.ac.id

Email³⁾: issusanto@radenintan.ac.id

Abstract

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2020–2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Data panel dari 15 kabupaten/kota dianalisis menggunakan regresi Fixed Effects Model (FEM) sebagai model terbaik. Hasil menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan TPAK dan PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

SOCIAL WELFARE FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE: AN EVALUATION OF LABOR FORCE PARTICIPATION, REGIONAL INCOME, AND ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE

Abstract

Community welfare is the primary objective of regional development, reflected through the Human Development Index (HDI). This study analyzes the influence of the Labor Force Participation Rate (LFPR), Regional Original Revenue (PAD), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the HDI of districts/cities in Lampung Province during 2020–2024 from an Islamic economic perspective. Panel data from 15 districts/cities were examined using regression analysis, with the Fixed Effects Model (FEM) identified as the most appropriate model. The findings reveal that GRDP has a positive and significant effect on HDI, while LFPR and PAD show positive but insignificant effects. Simultaneously, all three variables significantly affect community welfare. These results highlight that improving welfare in the Islamic economic perspective depends not only on economic growth but also on equitable development and resource management oriented toward public benefit (maslahah).

Keywords: *Islamic Economics, Community Welfare, Local Revenue, Gross Regional Domestic Product, Labor Force Participation Rate*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan semata, tetapi juga sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-maal). Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dipandang sebagai representasi empiris dari pemenuhan maqashid tersebut, karena mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, IPM tidak hanya merepresentasikan capaian pembangunan manusia secara statistik, tetapi juga mencerminkan tingkat kemaslahatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap IPM dapat dijelaskan melalui pendekatan maqashid syariah. TPAK mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah fil ardh, PAD merepresentasikan amanah fiskal pemerintah daerah dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan publik secara adil, sedangkan PDRB menunjukkan kapasitas pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga variabel (TPAK, PAD, dan PDRB) berkaitan langsung dengan dimensi IPM. TPAK meningkatkan produktivitas individu, PAD membiayai layanan publik (pendidikan dan kesehatan), sedangkan PDRB mencerminkan standar hidup layak suatu daerah. Dalam ekonomi Islam, IPM bukan sekadar indikator pembangunan, melainkan ukuran kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, dan pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, analisis IPM di Provinsi Lampung harus dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota. Hal ini penting untuk melihat variasi capaian antarwilayah yang dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi, kebijakan daerah, serta kondisi sosial masyarakat selama periode 2020–2024.

Tabel 1

Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	70,47	70,55	71,01	71,72	72,41
Tanggamus	68,58	68,79	69,32	69,93	70,54
Lampung Selatan	70,36	70,48	70,95	71,55	72,15
Lampung Timur	70,62	70,91	71,82	72,44	73,05
Lampung Tengah	71,97	72,04	72,59	73,39	74,16
Lampung Utara	69,58	69,78	70,19	70,78	71,42
Way Kanan	69,33	69,46	69,92	70,51	71,17
Tulang Bawang	70,07	70,28	71,08	71,56	72,24
Pesawaran	67,70	68,04	68,55	69,46	70,24
Pringsrewu	72,04	72,14	72,57	73,11	73,84
Mesuji	65,83	66,24	67,12	67,79	68,59
Tulang Bawang Barat	67,51	67,76	68,70	69,38	70,04
Pesisir Barat	68,43	68,79	69,58	70,40	71,04
Bandar Lampung	78,78	78,93	79,33	79,86	80,46
Metro	78,69	78,99	79,38	79,85	80,41
Provinsi Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024 mengalami tren peningkatan di seluruh wilayah, meskipun laju kenaikannya masih bervariasi. Secara agregat, IPM Provinsi Lampung meningkat dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 73,13 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Kota Bandar Lampung mencatat IPM tertinggi sebesar 80,46, diikuti Kota Metro sebesar 80,41, sedangkan Kabupaten Mesuji memiliki IPM terendah sebesar 68,59, diikuti Tulang Bawang Barat sebesar 70,04. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Lampung masih menghadapi permasalahan ketimpangan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah yang relatif tertinggal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat belum terdistribusi secara merata, sehingga manfaat pembangunan masih lebih terkonsentrasi pada wilayah dengan kapasitas ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena mengisyaratkan bahwa partisipasi tenaga kerja, kemampuan fiskal daerah, dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung

Pratama & Nursari (2025) menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan signifikan dalam mendorong peningkatan IPM di kabupaten/kota Lampung. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi kesejahteraan masyarakat diduga berkaitan dengan perbedaan struktur ekonomi dan kemampuan fiskal daerah, meskipun besarnya pengaruh masing-masing variabel masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Perkembangan TPAK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama 2020-2024 ditunjukkan Grafik berikut:

Tabel 2**Perkembangan TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	83,48	83,23	83,17	82,01	82,83
Tanggamus	59,72	68,76	68,91	70,6	70,75
Lampung Selatan	68,55	66,05	65,8	66,43	67,34
Lampung Timur	72,32	68,67	69,04	68,74	68,91
Lampung Tengah	73,05	72,26	76,75	73,32	73,51
Lampung Utara	68,12	66,7	63,96	65,5	66,55
Way Kanan	75,22	74,78	71,86	73,32	73,71
Tulang Bawang	70,07	70,28	71,08	71,56	72,24
Pesawaran	69,49	65,42	71,27	70,45	70,69
Pringsewu	68,69	67,03	73,17	73,29	73,55
Mesuji	70,51	69,21	70,45	70,15	70,2
Tulang Bawang Barat	71,58	72,32	70,21	70,77	70,9
Pesisir Barat	70,54	74,62	71,27	71,91	72,41
Bandar Lampung	67,79	67,18	66,7	66,05	66,25
Metro	69,01	66,71	68,36	68,92	70,08

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan data kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2020–2024. Rata-rata TPAK meningkat tipis dari 70,53 pada tahun 2020 menjadi 71,28 pada tahun 2024. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Pada tahun 2024, TPAK tertinggi tercatat di Lampung Barat sebesar 82,83, sedangkan terendah di Bandar Lampung sebesar 66,25, yang menunjukkan belum meratanya keterlibatan tenaga kerja produktif antardaerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi kerja belum selalu diikuti

oleh peningkatan kualitas hidup, karena masih terdapat persoalan pada kualitas pekerjaan, produktivitas, dan distribusi pendapatan.

Tabel 3**Perkembangan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	61219,47	71498,89	70315,34	63324,26	71823,78
Tanggamus	76828,49	95786,64	48989,81	49596,76	85806,36
Lampung Selatan	275143,00	295717,85	310575,86	319704,70	362885,68
Lampung Timur	157810,38	158378,91	195574,75	211396,66	207567,57
Lampung Tengah	179883,07	234891,26	212022,64	210810,01	239936,34
Lampung Utara	108672,85	104328,40	67759,04	93429,95	119317,45
Way Kanan	64617,68	70125,34	77242,58	77674,08	84726,92
Tulang Bawang	897673,55	106614,73	128693,24	721588,09	816745,00
Pesawaran	72158,81	81674,50	82092,05	81147,13	88449,17
Pringsewu	97122,94	113827,06	132228,89	126858,31	143895,71
Mesuji	50558,31	56989,39	69053,31	74284,70	88971,70
Tulang Bawang Barat	41093,46	46579,01	51532,99	47782,10	54654,93
Pesisir Barat	27813,38	28360,24	16757,48	20960,39	37738,58
Bandar Lampung	537542,44	564289,61	645965,43	636985,93	716588,15
Metro	221649,61	273845,05	239837,88	262957,05	332145,95

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, Penelitian oleh (Wijayanti & Laksono, 2024) menyatakan Di sisi lain, rata-rata PAD meningkat dari Rp137.460,00 juta menjadi Rp183.710,00 juta, sedangkan PDRB meningkat dari Rp16.165,12 miliar menjadi Rp18.853,10 miliar selama 2020–2024. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan IPM antara daerah perkotaan dan daerah yang relatif tertinggal di Provinsi Lampung.

Tabel 4**Perkembangan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	4926,3	5051,88	5256,95	5502,92	5742,84
Tanggamus	10679,82	10929,22	11384,34	11919,46	12397,91
Lampung Selatan	29743,3	30517,4	31986,26	33528,67	35077,05
Lampung Timur	28931,29	29001,37	29587,41	30625,3	32039,52
Lampung Tengah	47347,97	48710,04	50973,45	53366,74	55829,71
Lampung Utara	16269,34	16727,89	17257,06	17985,8	18722,4
Way Kanan	9462,31	9736,5	10165,6	10635,97	11130,37
Tulang Bawang	15614,89	16064,5	16685,48	17399,75	18225,72
Pesawaran	11258,77	11493,29	12016,35	12555,57	13044,68
Pringsewu	7647,66	7870,04	8214,07	8606,96	9001,15
Mesuji	6911,12	7107,31	7355,55	7653,92	8004,38
Tulang Bawang Barat	7747,24	7970,78	8328,39	8705,98	9101,7
Pesisir Barat	3069,6	3132,7	3221,12	3331,35	3418,39
Bandar Lampung	38632,2	39838,17	41798,71	43870,15	46051,58
Metro	4235,0	4358,39	4554,76	4775,93	5009,08

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, PDRB kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dengan variasi antarwilayah. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan kapasitas ekonomi tersebut menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan apabila mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Firmansyah & Wasil, 2024)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*inconsistent results*). Penelitian oleh (Pratama & Nursari, 2025) menemukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di kabupaten/kota Provinsi Lampung, terutama melalui peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan belanja sektor sosial. Namun, penelitian Priyono et al. (2020) menunjukkan bahwa PAD tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan apabila belum dialokasikan secara produktif pada pelayanan publik. Sementara itu, penelitian (Wijayanti & Laksono, 2024) menjelaskan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia karena masih terdapat persoalan pada kualitas pekerjaan, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara TPAK, PAD, PDRB, dan IPM masih memerlukan pengujian empiris yang lebih komprehensif, khususnya pada level kabupaten/kota.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menguji satu variabel secara parsial, tetapi juga menganalisis pengaruh TPAK, PAD, dan PDRB secara simultan terhadap IPM pada seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024. Selain itu, penelitian ini menambahkan perspektif ekonomi Islam sebagai landasan analisis untuk menelaah bagaimana partisipasi kerja, kapasitas fiskal daerah, dan pertumbuhan ekonomi dapat diarahkan pada pemerataan distribusi manfaat pembangunan dan pencapaian masalah masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan output, tetapi juga menyangkut fungsi manusia sebagai *kehalifah fil ardh*, yaitu pengelola sumber daya yang bertanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan sosial. TPAK berkaitan dengan optimalisasi peran manusia produktif dalam memakmurkan bumi, PAD mencerminkan amanah fiskal pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan publik, sedangkan PDRB menunjukkan kapasitas ekonomi wilayah yang harus didistribusikan secara adil agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Perspektif ekonomi syariah diperlukan untuk membedah masalah ini karena menekankan aspek distribusi, keadilan, dan maslahah, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi.

Penelitian (Rakian et al., 2025) menerapkan pendekatan Ekonomi Islam untuk memberikan sudut pandang perspektif normatif yang menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan output ekonomi, melainkan juga dari pemerataan distribusi manfaat pembangunan. Prinsip tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa distribusi hasil pembangunan, kapasitas fiskal daerah, dan pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM.

Dengan demikian, konsep khalifah fil ardh, distribusi kekayaan, dan maqashid syariah memiliki relevansi langsung dengan indikator empiris IPM sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja (barta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar barta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Menurut Al-Qur’an, ayat ini mengandung perintah Allah tentang pentingnya pemerataan distribusi kekayaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa kebijakan ekonomi daerah harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif ekonomi Islam diperlukan untuk membedah permasalahan kesejahteraan di Provinsi Lampung karena pendekatan ini tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi dari sisi output, tetapi juga dari sisi kualitas distribusi manfaat pembangunan. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa hasil pembangunan, kapasitas fiskal daerah, dan kesempatan kerja harus memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan perspektif ekonomi Islam membantu menjelaskan mengapa peningkatan TPAK, PAD, dan PDRB belum selalu diikuti pemerataan IPM antarkabupaten/kota, yaitu karena masih terdapat persoalan dalam distribusi pendapatan, akses layanan publik, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Selain itu, konsep masalah menjadi landasan penting bahwa kebijakan ekonomi daerah harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan kolektif yang nyata pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat sebagai dimensi utama pembangunan manusia (Annisa et al., 2025).

Berdasarkan penjabaran di atas, permasalahan yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024 dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung yang diprosikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *asosiatif* (*explanatory research*) yang bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang diperoleh dari publikasi

resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta sumber resmi lainnya. Penelitian ini juga memanfaatkan jurnal akademik dan laporan ilmiah yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan penalaran empiris. Kombinasi data statistik kuantitatif dari BPS, DJPK, dan hasil serta laporan dari jurnal memungkinkan analisis yang komprehensif dan *triangulasi* data, yang dapat memperkuat validitas penelitian (BPS, 2024). Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Pendekatan kuantitatif ini dikaji dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam menilai kesejahteraan masyarakat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Muhammadinah & Anggraini, 2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024, sehingga diperoleh total 75 observasi

Penelitian ini menggunakan total *sampling (census)*, yaitu teknik pengambilan data dengan melibatkan seluruh populasi sebagai unit observasi penelitian. Penggunaan total *sampling* dipilih karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki data yang lengkap dan relevan dengan variabel penelitian, sehingga tidak diperlukan proses pemilihan sampel tertentu sebagaimana pada teknik *purposive sampling* atau *nonprobability sampling*. Data dikumpulkan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan lembaga terkait lainnya, memastikan ketersediaan dan kelengkapan data untuk analisis yang valid.

Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y), yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam perspektif Ekonomi Islam, IPM dikaitkan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifdz an-nafs* melalui dimensi kesehatan, *hifdz al-aql* melalui pendidikan, dan *hifdz al-maal* melalui standar hidup layak. Integrasi ini menunjukkan bahwa IPM tidak hanya merefleksikan pembangunan manusia secara statistik, tetapi juga berkaitan dengan tujuan perlindungan kemaslahatan dalam Islam (Fadlan, 2019).

Variabel Independen

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, TPAK mencerminkan prinsip *ikhtiar*, yaitu usaha manusia untuk bekerja secara produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Partisipasi kerja yang tinggi menunjukkan optimalisasi sumber daya manusia yang sejalan dengan konsep amal produktif serta mendukung terciptanya kemaslahatan sosial melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat (Rakian et al., 2025).

2. Pendapatan Asli Daerah (X2)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, PAD dipandang sebagai bentuk amanah fiskal yang harus dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Optimalisasi PAD sejalan dengan prinsip keadilan distribusi karena pendapatan daerah seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Fattah, 2024).

3. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

Dalam perspektif Ekonomi Islam, PDRB mencerminkan kapasitas produksi ekonomi daerah yang harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan output, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB harus mampu menciptakan masalah, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung distribusi kesejahteraan yang adil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Amarta et al., 2025).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dijelaskan operasional variabel penelitian sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut;

Tabel 5
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penduduk usia Kerja yang bekerja Penduduk yang sedang mencari Kerja	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Total PAD Kabupaten/Kota	Ln Total PAD
Produk Domestik Regional Bruto	Nilai PDRB ADHK 2018 per Kab/Kota	Ln PDRB
Kesejahteraan Masyarakat	Nilai IPM Kab/Kota	Rasio

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Data Panel

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel sebagai pendekatan statistik utama. Analisis regresi panel adalah jenis analisis regresi yang menggunakan struktur data panel. Data panel merupakan *data cross section* dan *data time series* yang digabungkan:

Model regresi data panel menggunakan formula berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X_{1it} = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- X_{2it} = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_{3it} = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK per kapita
- a = *intercept* (konstanta)
- i = unit *cross-section* (kabupaten/kota di Lampung)
- t = periode waktu (2020–2024)
- ε_{it} = *error term* (*residual*/gangguan)

Uji Ketetapan Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika *F-statistik* > *F-tabel* ($\alpha = 5\%$), maka model FEM lebih tepat (Chairunnisa & Fauzan, 2023).

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut: (Afif, 2025)

- a. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima = H_0 : *Random Effect*
- b. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima = H_a : *Fixed Effect*

Uji Asumsi Klasik (*Diagnostik Model*)

Beberapa pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (Muhammadinah & Litriani, 2018)

1. Uji *Multikolinearitas*

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang kuat antarvariabel independen. Pada data panel, pengujian dapat dilakukan menggunakan uji *Breusch-Pagan* atau *White*. Model dinyatakan tidak mengalami *heteroskedastisitas* apabila nilai probabilitas (*p-value*) $> 0,05$, yang menunjukkan *varians residual* bersifat konstan

2. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* dilakukan untuk menentukan apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau mengalami variasi antarpengamatan. Pengujian ini dilakukan melalui analisis *scatterplot* antara residu dan nilai prediksi. Apabila sebaran titik residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah *heteroskedastisitas*.

3. Uji *Normalitas* (Uji Pendukung)

Uji *normalitas* digunakan untuk mengetahui apakah *residu* yang dihasilkan dari model regresi data panel berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. *Residual* dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik *Jarque-Bera* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka residu tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residu normal atau mendekati normal.

Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji t statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen (TPAK, PAD, PDRB) terhadap variabel dependen IPM dalam model regresi data panel. (Yulianto & Dwindi, 2024)

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima

2. Uji F

Uji F diaplikasikan dalam studi ini dengan tujuan untuk secara komprehensif mengevaluasi apakah semua variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen, dengan kriteria

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima.

3. Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai *R-squared* berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Semakin mendekati 1 berarti semakin baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, analisis statistik deskriptif dilakukan terlebih dahulu guna menggambarkan karakteristik umum dan distribusi data pada setiap variabel penelitian. Pendekatan ini menyajikan informasi pokok berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar *deviasi* (*std. dev.*) sebagai dasar pemahaman awal terhadap kondisi data dalam studi ini. Variabel yang dianalisis mencakup variabel dependen dan independen sesuai dengan kerangka model penelitian. Ringkasan hasil analisis tersebut dirangkum dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Maximum	Std.Deviation
TPAK (X1)	75	59,72	83,48	70,64	4,40
PAD (X2)	75	16.757.480	716.588.100	158.249.200	150.428.700
PDRB (X3)	75	3.06,60	55.839,71	17.373,77	14.349,51
IPM (Y)	75	65,83	80,46	71,58	3,54

Sumber: BPS dan DJPK; data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, N atau jumlah data setiap variabel berjumlah 75. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X1) memiliki nilai maksimum 83,48% dan minimum 59,72%, dengan rata-rata 70,64% serta standar deviasi 4,40 yang menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Lampung relatif cukup tinggi dengan variasi antarwilayah yang masih terlihat. Pendapatan Asli Daerah (X2) menunjukkan nilai maksimum sebesar Rp716.588.200 dan minimum Rp16.757.480 dengan rata-rata Rp158.249.200 serta standar deviasi Rp150.428.700. Nilai tersebut mencerminkan adanya perbedaan kemampuan fiskal yang cukup besar antarkabupaten/kota. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (X3) memiliki nilai maksimum sebesar Rp55.839,71 juta dan minimum Rp3.036,60 juta, dengan rata-rata Rp17.373,77 juta serta standar deviasi Rp14.349,51 juta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup lebar antarwilayah. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (Y) memiliki nilai maksimum 80,46 dan minimum 65,83 dengan rata-rata 71,58 serta standar *deviasi* 3,54 yang mengindikasikan bahwa variasi tingkat pembangunan manusia antar Kabupaten/kota relatif lebih rendah dibandingkan variabel ekonomi

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Hasil uji Chow, uji Hausman dan uji LM dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7**Hasil Uji Chow, Uji hausman dan Uji LM**

Pengujian	Statistic	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow	43.549179	0.000	FEM
Uji Hausman	26.109569	0.000	FEM
Uji LM (Breusch Pagan)	100.3353	0.0000	FEM

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel pada Tabel 7, Uji Chow menunjukkan nilai *probabilitas* sebesar 0,0000 dengan nilai statistik 43,549179. Nilai *probabilitas* tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Penolakan H_0 pada Uji Chow menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memengaruhi

hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, penggunaan FEM dinilai lebih mampu menangkap heterogenitas antar wilayah dibandingkan CEM yang mengasumsikan intersep yang sama untuk seluruh kabupaten/kota

Berdasarkan hasil Uji *Hausman*, diperoleh nilai statistik sebesar 26,109569 dengan nilai *probabilitas* 0,0000. Karena nilai *probabilitas* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik khusus pada masing-masing kabupaten/kota memiliki korelasi dengan variabel independen dalam model, sehingga FEM dinilai lebih konsisten dan efisien untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil *Uji Lagrange Multiplier* (LM) *Breusch-Pagan* menunjukkan nilai statistik sebesar 100,3353 dengan *probabilitas* 0,0000, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan adanya efek individual dalam *data panel*, sehingga model *data panel* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *common effect*. Namun, berdasarkan keseluruhan tahapan pengujian, khususnya hasil Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, model yang paling sesuai dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

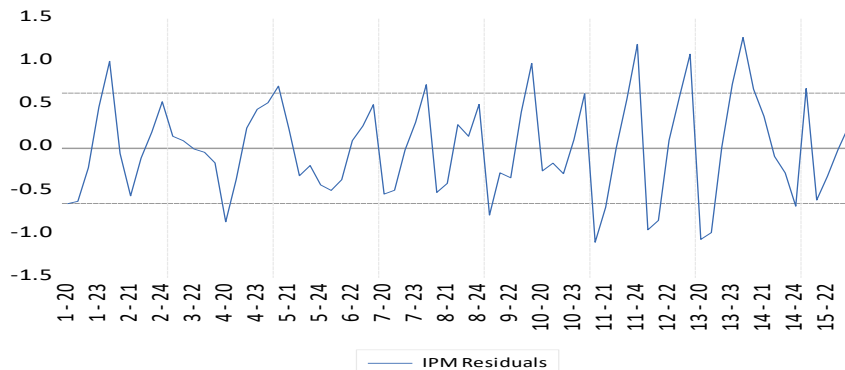
Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	TPAK	PAD	PDRB
TPAK	1,0000	-0,3453	-0,2151
PAD	-0.3453	1,0000	0,6727
PDRB	-0.3453	0,6726	1,0000

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, hasil *multikolinearitas* menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen, yaitu TPAK, PAD dan PDRB, seluruhnya berada di bawah 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah *multikolinearitas*, sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



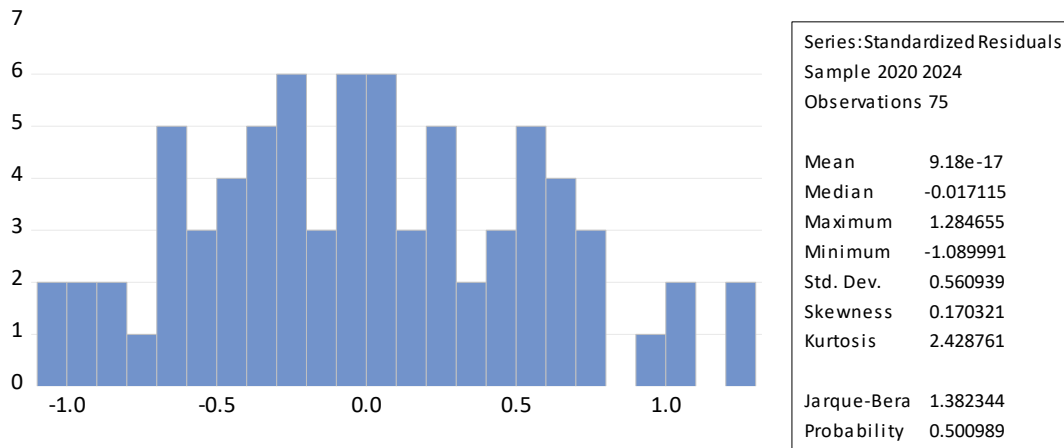
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Berdasarkan Gambar 1 hasil *heteroskedastisitas* menunjukkan bahwa sebaran *residual* berfluktuasi secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual relatif konstan pada seluruh pengamatan, sehingga

model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi *homoskedastisitas* terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Berdasarkan hasil Gambar 2 diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 1.382344 dengan nilai *probabilitas (p-value)* sebesar 0.500989. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat *signifikansi* 0,05 (5%), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, *residu* dalam model regresi berdistribusi normal, yang menunjukkan bahwa penyebaran *error* tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal.

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi data panel dengan model terpilih FEM sebagai berikut.

Tabel 9

Hasil Regresi *Fixed Effect Model (FEM)*

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob
C	60,29855	19,67987	0,0000
TPAK	0,063179	1,501559	0,1387
PAD	0,00190	0,439801	0,6617
PDRB	0,000377	4,980967	0,0000
<i>R-squared</i>	0,974937		
<i>Adjusted R-squared</i>	0,967463		
<i>F-statistic</i>	130.4295		
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000000		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, data diolah, 2026

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model (FEM)* yang ditunjukkan pada Tabel 9, diperoleh nilai *koefisien*, *t-statistic*, dan probabilitas (*p-value*) yang digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut:

$$IPM_t = 60,29855 + 0,063179 \text{ TPAK}_{it} + 0,00190 \text{ PAD}_{it} + 0,000377 \text{ PDRB}_{it}$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 60,29855 menunjukkan bahwa apabila Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto

dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Lampung berada pada angka 60,30.

2. Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,063179, yang berarti apabila TPAK meningkat sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0,063179 poin, dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,00190, yang berarti apabila PAD meningkat sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0,00190 poin, dengan asumsi variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,000377, yang berarti apabila PDRB meningkat sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar 0,000377 poin, dengan asumsi variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap IPM

Variabel TPAK memiliki koefisien sebesar 0,063179 dengan nilai signifikansi 0,1387 > 0,05, yang berarti bahwa secara parsial TPAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja belum mampu secara signifikan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Lampung.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM

Variabel PAD memiliki koefisien sebesar 0,00190 dengan nilai signifikansi 0,6617 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap IPM

Variabel PDRB memiliki koefisien sebesar 0,000377 dengan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05, yang berarti bahwa secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas dan kinerja ekonomi daerah berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Lampung.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap IPM

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*, diperoleh nilai *F-Statistic* sebesar 130,4295 dengan nilai *probabilitas (F-Statistic)* sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan layak dan dapat diterima secara statistik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,974937 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,967463. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu TPAK, PAD, dan PDRB, secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 97,49%, sedangkan sisanya sebesar 2,51% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan model *Fixed Effects Model* (FEM), variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,063179 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,1387 > 0,05$. Dengan demikian, TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kesempatan kerja yang tersedia masih didominasi oleh sektor informal dengan produktivitas rendah, kualitas tenaga kerja belum merata, serta upah yang diperoleh belum cukup untuk mendorong peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang menjadi komponen utama IPM.

Berdasarkan hasil temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah partisipasi tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan perkataan lain, tingginya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu kualitas kerja menjadi faktor penting dalam menjelaskan belum signifikannya pengaruh TPAK terhadap IPM. Dalam konteks ini, pekerjaan yang tersedia perlu tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja, tetapi juga memberikan kualitas hasil kerja yang baik, produktivitas tinggi, serta imbalan yang layak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja bukan sekadar partisipasi, tetapi juga harus memenuhi prinsip *itqan*, yaitu profesionalisme, ketelitian, dan kualitas kerja yang optimal. Selain itu, Islam menekankan prinsip *ujrah*, yaitu pemberian upah yang adil dan layak sesuai kontribusi pekerja agar kesejahteraan dapat tercapai secara lebih merata. Oleh karena itu, tingginya TPAK tanpa diiringi kualitas kerja yang baik dan sistem upah yang adil belum tentu berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian (Hanif et al., 2020) menekankan bahwa pendidikan dan budaya kerja mempunyai peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa hadirnya tenaga kerja yang banyak harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan etos kerja agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan manusia. Dapat diperkuat melalui kerangka *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*. Kualitas kerja yang baik berkontribusi pada *hifz al-nafs* melalui kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kehidupan yang layak, mendukung *hifz al-aql* melalui peningkatan akses pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta memperkuat *hifz al-mal* melalui distribusi pendapatan yang adil dan produktif. Dengan demikian, peningkatan partisipasi kerja baru

akan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan apabila disertai kualitas pekerjaan yang mendukung perlindungan jiwa, akal, dan harta masyarakat sesuai tujuan syariah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai koefisien sebesar $1,90E-12$ dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,6617 > 0,05$. Dengan demikian, PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020–2024. Hasil ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Halim yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan IPM, karena kemungkinan alokasi PAD masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan operasional, serta adanya ketimpangan fiskal antardaerah yang menyebabkan pembangunan manusia belum merata di seluruh kabupaten/kota.

Secara teoritis, PAD seharusnya mendukung pembiayaan pelayanan publik. Namun, tidak signifikannya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas alokasi dan prioritas penggunaan anggaran lebih menentukan dibandingkan besarnya penerimaan daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini perlu dipahami melalui prinsip amanah dan akuntabilitas, di mana harta publik seperti PAD harus dikelola secara efisien dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat luas. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah mursalah, yaitu pengelolaan kebijakan yang diarahkan pada manfaat umum. Oleh karena itu, tidak signifikannya PAD dapat menjadi indikasi adanya inefisiensi dalam distribusi kekayaan daerah sehingga manfaat fiskal belum optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Mahardika et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan penelitian Priyono et al. (2020) yang menunjukkan bahwa PAD tidak selalu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola secara produktif. Oleh karena itu, optimalisasi belanja publik yang berorientasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan menjadi kunci agar PAD dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan model *Fixed Effects Model* (FEM), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh nilai koefisien sebesar $0,000377$ dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020–2024. Hasil ini sejalan dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang sehingga dapat memperbesar pendapatan masyarakat dan memperluas kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan serta kesehatan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil temuan empiris, dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki kemampuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan standar hidup secara keseluruhan.

Peningkatan kapasitas ekonomi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam mendorong pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Amelia Sholeha et al., 2025) yang menelaah determinan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak semua variabel ekonomi memberikan pengaruh signifikan secara langsung.

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini juga dapat dihubungkan dengan konsep *Maqashid Syariah*, di mana pertumbuhan PDRB yang berkualitas berfungsi sebagai *wasilah* untuk menjaga *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) melalui peningkatan layanan kesehatan dan kualitas hidup, serta *hifdz al-aql* (perlindungan akal) melalui perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output daerah, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan syariah.

Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM), pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh satu indikator ekonomi, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi daerah yang mencakup aktivitas tenaga kerja, kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta perkembangan aktivitas ekonomi wilayah.

Meskipun secara parsial hanya variabel PDRB yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, keberadaan variabel TPAK dan PAD tetap memiliki peran dalam dinamika pembangunan daerah. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan PAD mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Todi et al., 2025) yang menunjukkan bahwa dalam analisis ekonomi menggunakan pendekatan regresi data panel, tidak semua variabel ekonomi memberikan pengaruh signifikan secara parsial, namun secara bersama-sama variabel tersebut tetap berkontribusi terhadap stabilitas dan kinerja sistem ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Lampung memerlukan sinergi antara pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan partisipasi tenaga kerja, serta pengelolaan kapasitas fiskal daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi antara TPAK, PAD, dan PDRB merupakan prasyarat penting untuk mencapai *falāh*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Partisipasi kerja merepresentasikan ikhtiar manusia dalam memperoleh penghidupan yang halal dan produktif, PAD mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola amanah fiskal untuk kemaslahatan publik, sedangkan PDRB menunjukkan kapasitas pertumbuhan ekonomi yang menopang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pencapaian kesejahteraan tidak dapat hanya mengandalkan satu aspek saja, melainkan membutuhkan keterpaduan antara kualitas tenaga kerja,

pengelolaan fiskal yang amanah, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar tujuan pembangunan manusia yang selaras dengan nilai-nilai syariah dapat terwujud secara berkelanjutan (Lestari et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa secara independen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Lampung untuk tahun 2020–2024. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menegaskan bahwa PDRB merupakan penggerak utama peningkatan IPM di Provinsi Lampung, karena pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat terbukti mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai komponen utama pembangunan manusia.

Di sisi lain, variabel TPAK dan PAD belum menunjukkan pengaruh yang optimal terhadap pembangunan manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi tenaga kerja masih menghadapi persoalan kualitas pekerjaan, produktivitas, dan tingkat upah yang belum merata, sementara kapasitas fiskal daerah melalui PAD belum sepenuhnya teralokasi secara efektif pada sektor-sektor yang secara langsung mendukung peningkatan IPM. Dengan demikian, TPAK dan PAD masih memerlukan optimalisasi kebijakan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian ini memperkuat kerangka maqashid syariah, khususnya pada aspek *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-aql*, di mana pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Namun demikian, pencapaian kesejahteraan yang hakiki tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memerlukan pemerataan kesempatan kerja yang berkualitas serta pengelolaan fiskal daerah yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, integrasi antara pertumbuhan ekonomi, kualitas tenaga kerja, dan efektivitas PAD menjadi fondasi penting dalam mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat yang selaras dengan tujuan syariah.

Secara keseluruhan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2020–2024 secara simultan. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan karena hanya terfokus pada periode tahun 2020–2024 dengan variabel yang terbatas pada TPAK, PAD, dan PDRB, sehingga masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi IPM seperti kualitas pendidikan, belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas periode studi, menambahkan variabel yang lebih relevan, dan menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi demi memperoleh hasil penelitian yang lebih menyeluruh.

REFERENCES

Afif, F. Y. (2025). *Analyzing Poverty Across Indonesian Provinces Using Panel Data Regression*. 14(2), 77–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v14i2.4133>

- Amarta, M. I., Ibbas, R., Sauddin, A., & Alwi, W. (2025). *Pemodelan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan regresi nonparametrik spline*. 19(1), 64–75. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.55454>
- Amelia Sholeha, Liya Ermawati, & Sania Nuraziza. (2025). Determinants of Economic Growth in Indonesia From an Islamic Economics Perspective. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 11(1), 176–194. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v11i1.28558>
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan. *234 Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 2025. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024*.
- Chairunnisa, A. D. A., & Fauzan, A. (2023). Implementation of Panel Data Regression in the Analysis of Factors Affecting Poverty Levels in Bengkulu Province in 2017-2020. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 4(1), 40–45. <https://doi.org/10.20885/EKSAKTA.vol4.iss1.art5>
- Fadlan. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 194–208. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Firmansyah, A. H., & Wasil, M. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Hanif, Ermawati, L., & Sari, D. P. (2020). Analisis Pengaruh Budaya Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7024>
- Lestari, R. Y., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2815–2825. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9681>
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 135–147. <https://doi.org/10.18860/em.v13i2.15479>
- Muhammadinah, & Anggraini, J. (2018). *Practical Module Statistics*. Noerfikri.
- Muhammadinah, & Litriani, E. (2018). *Pratikum Ekonometrika Untuk Ekonomi dan Bisnis Aplikasi Dengan SPSS (Pertama)*. Malang: Intelegensia Media.
- Pratama, M. I., & Nursari, A. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1782>
- Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. K. (2020). The Determinants of Level of Society Welfare Within Fiscal Decentralization Framework in Regional Autonomy Era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 60–70. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.10545>

- Rakian, K. A. P., Kekenusa, J. S., & Nainggolan, N. (2025). Model Regresi Data Panel Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024. *D'Cartesian*, 14(2), 103–110. <https://doi.org/10.35799/dc.14.2.2025.61809>
- Todi, D. S., Anggraeni, E., & Susanto, I. (2025). Pengaruh TPAK, Pendidikan, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Termiskin Se-Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7, 135–140. <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i2.1108>
- Wijayanti, D., & Laksono, E. N. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kota Provinsi Lampung tahun 2017 – 2021. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss1.art2>
- Yulianto, S., & Dwindi, D. (2024). Regresi Data Panel Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Square: Journal of Mathematics and Mathematics Education*, 6(1), 55–62. <https://doi.org/10.21580/square.2024.6.1.21583>